

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama: Bandung,
- Bambang Sugono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2000.
- 2006, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya: Jakarta.
- Burhan bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia: Bandung.
- , 2012, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia :
Bandung
- C.S.T Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Dwidja Priatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indoneseia*, Revika Aditama :
Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico: Bandung.

Romli Atmasastima, 1987, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Amico:Bandung.

Sanusi Has,1976, *Penologi*, Medan.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada: Jakarta.

-----, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press:Jakarta

-----, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Rajawali Pers.

Sudarsono,2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disebut KUHAP

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999



Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999,
tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Website:

<http://www.antikorupsi.org/en/content/pembebasan-bersyarat-hartati-murdaya-cacat-hukum>

<http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan>

